

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS

4.1 Gambaran Sampel

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode data arsip dengan menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data diperoleh dengan melihat dan mengumpulkan laporan keuangan perusahaan, yaitu melihat dari aspek-aspek yang ada dalam perusahaan seperti jumlah komisaris perusahaan yang independen, kompetensi komite audit, struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, dan juga kebijakan anti korupsi. Data sampel juga dilakukan dengan melihat *Bloomberg data* untuk variabel struktur kepemilikan institusional dan juga variabel tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*). Laporan keuangan yang diambil adalah laporan keuangan dari perusahaan yang berada di dalam sektor perdagangan, investasi dan jasa yang berjumlah 152 perusahaan diambil sebesar 6 tahun periode.

Mengingat ada beberapa perusahaan yang laporan keuangannya tidak bisa di akses lagi, maka data sampel yang digunakan hanya beberapa perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang masih bisa diakses. Dari data yang berjumlah total 912 sampel data, ada 290 laporan keuangan perusahaan yang tidak bisa di akses. Oleh karena itu, sampel data yang digunakan ada 622 laporan keuangan yang bisa diakses yang digunakan menjadi sampel yang diraikan sebagai berikut:

Kriteria	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Σ
Perusahaan terdaftar di BEI selama periode 2013 hingga 2018.	152	152	152	152	152	152	912
Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang laporan keuangannya tidak dapat diakses selama periode 2013-2018	(72)	(61)	(50)	(47)	(39)	(21)	(290)
Total Sampel	80	91	102	105	113	131	622

Data Sumber : Lampiran 2

4.2 Statistik Deskriptif

Dalam bagian bab ini peneliti akan membahas tentang hasil statistik deskriptif dari penelitian yang sudah dilakukan dan dijelaskan pada penjelasan bab sebelumnya. Data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan jumlah data awal yaitu 622 data.

Tabel 4.2. Statistik deskriptif

	KAK	IDKS	KKA	SKI	SKM	SKB	TKP
Mean	0.285466	0.397412	0.336768	0.454148	0.051061	0.700579	0.079807
Median	0.290000	0.330000	0.330000	0.440000	0.000000	0.750000	0.000000
Maximum	0.850000	0.750000	0.890000	0.950000	0.840000	0.990000	0.570000
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.183426	0.121115	0.281096	0.303197	0.136904	0.201550	0.181036
Skewness	0.315666	-0.144589	0.001397	-0.009744	3.238480	-1.413924	1.948262
Kurtosis	2.513171	5.209284	1.455223	1.689685	13.75654	5.194755	5.010663

Jarque-Bera	16.47217	128.6648	61.84605	44.50683	4085.869	332.0878	498.2652
Probability	0.000265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	177.5600	247.1900	209.4700	282.4800	31.76000	435.7600	49.64000
Sum Sq. Dev.	20.89361	9.109333	49.06820	57.08750	11.63930	25.22659	20.35258
Observations	622	622	622	622	622	622	622

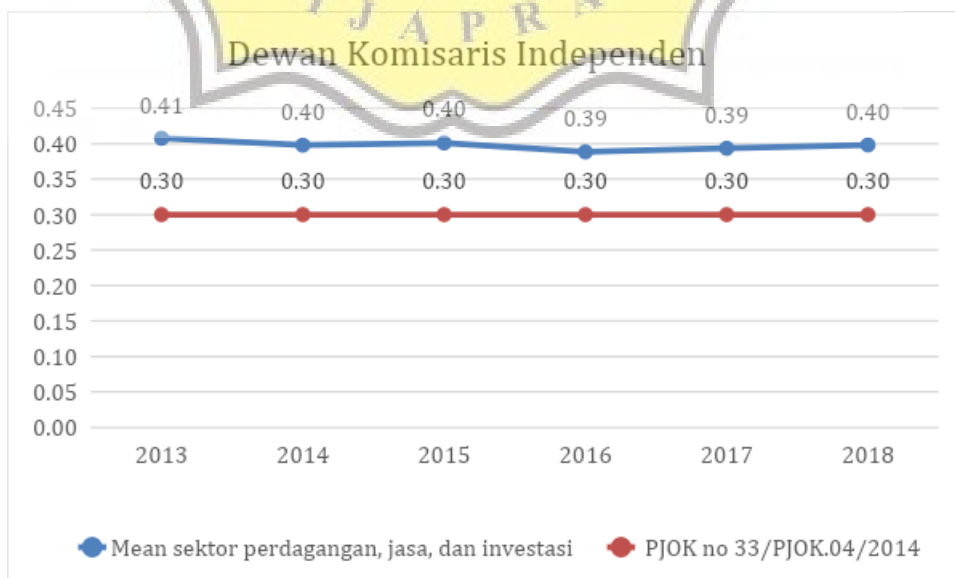
Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 diketahui variabel kebijakan anti korupsi (KAK) nilai mean atau rata-rata 0.285466, nilai maksimum 0.850000, nilai minimum 0.000000 sedangkan nilai standar deviasi 0.183426. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi relative kecil hanya 28.5466% saja. Variabel IDKS (independensi dewan komisaris) nilai mean atau rata-rata 0.397412, nilai maksimum 0.750000, nilai minimum 0.000000 sedangkan nilai standar deviasi 0.121115. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata dewan komisaris independent 39.7412% dibandingkan total dewan komisarisnya.

Variabel KKA (Keahlian Komite audit) nilai mean atau rata-rata 0.336768, nilai maksimum 0.890000, nilai minimum 0.000000 sedangkan nilai standar deviasi 0.281096. Artinya mayoritas perusahaan pada penelitian ini memiliki rata-rata 33.6768% komite audit yang memiliki keahlian keuangan. Variabel SKI (struktur kepemilikan institusional) nilai mean atau rata-rata 0.454148, nilai maksimum 0.950000, nilai minimum 0.000000 sedangkan nilai standar deviasi 0.303197. Artinya menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini dimiliki oleh pihak luar 45.4148%.

Untuk variabel SKM (struktur kepemilikan manajerial) nilai mean atau rata-rata 0.051061, nilai maksimum 0.840000, nilai minimum 0.000000 sedangkan nilai standar deviasi 0.136904. Artinya rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini rata-rata dimiliki oleh pihak dalam perusahaan sebesar 5.1061%. Variabel SKB (struktur kepemilikan blockholder) nilai mean atau rata-rata 0.700579, nilai maksimum 0.990000, nilai minimum 0.000000 sedangkan nilai standar deviasi 0.201550. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini rata-rata dimiliki oleh pihak blokholder sebesar 70.0579%. Variabel TKP (tata kelola perusahaan) nilai mean atau rata-rata 0.079807, nilai maksimum 0.570000, nilai minimum 0.000000 sedangkan nilai standar deviasi 0.181036. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki pengungkapan tata Kelola perusahaan relative kecil hanya 7.9807% dari total seluruh pengungkapan tata Kelola perusahaan.

Gambar 1 Nilai rata-rata tahunan variabel Dewan Komisaris Independen perusahaan



Data sumber: Lampiran

Berdasarkan Gambar 1 yang memperlihatkan bahwa gambar nilai rata-rata per tahun dari variabel dewan komisaris independen (IDKS) di perusahaan yang berada di bawah sektor perdagangan, jasa dan investasi mengalami pergerakan fluktuatif. Walaupun pergerakan dari hasil nilai rata-rata per tahun variabel independensi dewan komisaris berfluktuatif, tetapi nilai rata-rata yang dihasilkan masih berada diatas batas minimal yang di tetapkan oleh OJK melalui PJOK no 33/PJOK.04/2014 yaitu sebesar 30% dewan komisaris independen dari total keseluruhan dewan komisaris.

Gambar 2 Nilai rata-rata variabel Kompetensi Komite Audit periode 2013-



Data sumber: Lampiran

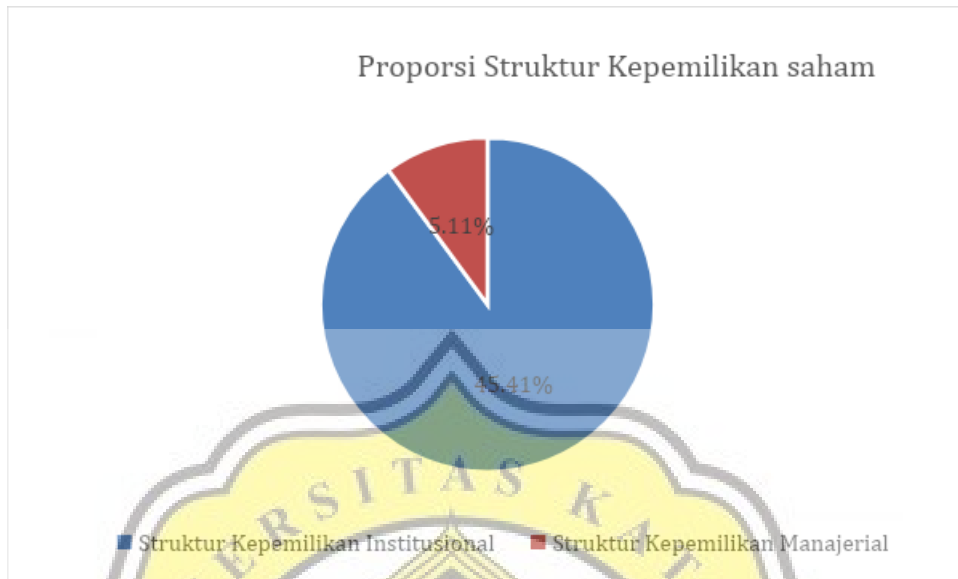
Berdasarkan peraturan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) Otoritas Jasa Keuangan no 55 pasal 7 poin E mengatakan bahwa perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi maupun keuangan. Jika dilihat berdasarkan penjelasan yang digambarkan pada

gambar 2 , nilai persentase yang dihasilkan oleh variabel kompetensi komite audit per tahunnya sudah berada diatas syarat yang dikeluarkan oleh OJK. Rata-rata perusahaan memiliki anggota komite yang berkompeten yang berarti memiliki anggota komite yang memiliki kompetensi baik di bidang akuntansi maupun di bidang keuangan. Bidang akuntansi yang di maksud adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sarjana akuntansi maupun pengalaman bekerja di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Nilai rata-rata dari variabel Kompetensi Komite audit ini bersifat fluktuatif, tetapi bisa dilihat berdasarkan gambar 2 bahwa terdapat pergerakan yang cukup signifikan yang terjadi diantara tahun 2015 menuju 2016. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 menuju tahun 2016 perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi mulai mengerti pentingnya memiliki

komite audit yang berkompeten, hal ini dibuktikan adanya penambahan perusahaan sampel yang mulai memiliki komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3 Perbandingan nilai variabel struktur kepemilikan saham periode 2013-2018



Data sumber: Lampiran

Berdasarkan gambaran yang disajikan dalam gambar 3 dapat dilihat bahwa perusahaan yang terdaftar dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi dimiliki oleh struktur kepemilikan institusional sebagai kepemilikan tertinggi dengan nilai rata-rata yang dihasilkan selama periode 2013-2018 sebesar 45,51%. Kepemilikan insitusional yang menjadi pemilik tertinggi perusahaan dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi sendiri adalah institusional seperti perusahaan asuransi, bank swasta maupun negara, perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, koperasi simpan pinjam pinjam maupun institusi perusahaan.

Gambar 2 juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berada di sektor perdagangan, jasa, dan investasi juga dimiliki oleh struktur kepemilikan manajerial dengan jumlah nilai rata-rata variabel periode 2013-2018 sebesar 5,11%. Nilai rata-

rata dari variabel ini bisa dikatakan tergolong rendah karena nilai rata-rata yang dihasilkan berada dibawah persentase 10%.

Gambar 4 Nilai rata-rata variabel Struktur Kepemilikan *blockholder* periode 2013-2018



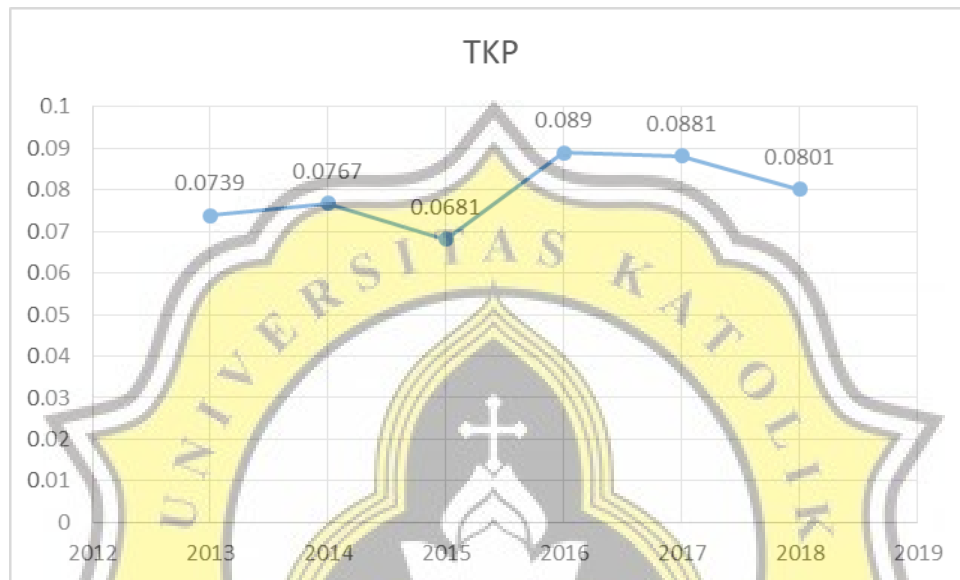
Data Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan gambar 4 menjelaskan bahwa pada sektor perdagangan, jasa dan investasi perusahaan yang terdaftar memiliki nilai rata-rata kepemilikan Blockholder sebesar 70.06% yang artinya kepemilikan saham yang nilai kepemilikannya 5% atau lebih cenderung lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan lainnya yang memiliki nilai kepemilikan dibawah 5%

Kepemilikan *blockholder* sendiri adalah kepemilikan saham baik institusional, perorangan maupun manajerial yang memiliki kepemilikan saham diatas 5% (Thomsen et al., 2006). Jadi bisa disimpulkan bahwa sektor perdagangan, jasa dan

investasi kepemilikan sahamnya didominasi oleh kepemilikan saham yang nilainya diatas 5% atau lebih.

Gambar 5 Nilai rata-rata variabel Tata kelola perusahaan periode 2013-2018



Data Sumber: Lampiran 4

Pada gambar 5 bisa di lihat bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel Tata Kelola Perusahaan adalah sebesar 7%. Belum ada peraturan yang mengatur mengenai nilai tata kelola perusahaan, namun berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh (WBCSD, 2019) mengatakan bahwa jika perusahaan memiliki skoring ESG yang tinggi, maka perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Jika dilihat dari gambar 5, walaupun nilai rata-rata variabel per tahunnya cenderung mengalami peningkatan, tetapi nilai rata-rata variabel Tata Kelola Perusahaan di sektor perdagangan, jasa, dan investasi belum berada diatas nilai 10%, yang artinya nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel ini per tahunnya masih cenderung kecil.

Berdasarkan penjelasan gambar 5 bisa disimpulkan bahwa nilai tata kelola perusahaan pada sektor ini masih rendah yang menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan dalam sektor ini masih belum baik.

Gambar 6 Perbandingan rata-rata variabel Kebijakan anti Korupsi periode 2013-2018



Data Sumber: Lampiran 4

Dalam penjelasan gambar 6 dapat memberikan gambaran nilai rata-rata perusahaan yang ada di bawah sektor perdagangan jasa dan investasi periode 2013-2018 bersifat fluktuatif. Penjelasan fluktuatif dari rata-rata kebijakan anti korupsi dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa perusahaan yang ada dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi nilai perusahaan dibawah sektor perdagangan yang masih belum memiliki nilai kebijakan anti korupsi yang baik. Nilai rata-rata total dari variabel kebijakan anti korupsi tergolong rendah yaitu sebesar 0,2855.

Sektor perdagangan jasa dan investasi memiliki beberapa subsektor yang dibagi menjadi : Subsektor perdagangan besar (grosir) yang diisi oleh 40 emiten salah satunya perusahaan Enseval Putera Megatrading Tbk. Subsektor perdagangan eceran (retail) yang diisi oleh 25 emiten salah satunya adalah perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk dan Matahari Departement Store Tbk. Subsektor berikutnya adalah Restoran, Hotel dan Pariwisata yang diisi oleh 35 emiten salahsatunya MNC land Tbk, Red Planet Tbk dan Jakarta International Hotels Tbk. Subsektor lainnya adalah Advertising, Printing dan Media yang diisi oleh 17 emiten seperti perusahaan First media Tbk, Link Net Tbk dan Surya Citra Media Tbk. Subsektor selanjutnya adalah subsektor kesehatan yang diisi oleh 8 emiten salah satunya adalah perusahaan rumah sakit Siloam Intenational Hospitals Tbk. Subsektor Jasa Komputer dan perangkat yang diisi oleh 9 emiten seperti Indoritel Makmur Internasional Tbk. Subsektor selanjutnya adalah perusahaan investasi yang diisi oleh 12 emiten salah satunya Global mediacom Tbk maupun Bakrie & Brothers Tbk. Subsektor terakhir adalah subsektor yang termasuk dalam bagian jasa, perdagangan, dan investasi, namun tidak spesifik menjelaskan dibidang seperti apa diisi oleh perusahaan seperti Tanah Laut Tbk.

Rendahnya nilai kebijakan anti korupsi yang ada dalam sektor perdagangan jasa dan investasi bisa dilihat dari subsektor dan jenis perdagangan yang ada dalam perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Sebagian besar perusahaan dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi menyadari bahwa kebijakan anti korupsi penting tetapi bukan sesuatu yang *urgent* dilihat dari perusahaan sampel yang latar belakangnya kebanyakan menjual barang dagangan seperti jasa yang kemungkinan masih belum *concern* kepada kebijakan anti korupsi yang lengkap.

Alasan lainnya muncul karena kebijakan anti korupsi di Indonesia masih bersifat pengungkapannya sukarela, jadi perusahaan masih memiliki pilihan mau atau tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan memiliki kebijakan anti korupsi yang lengkap atau kebijakan anti korupsi yang baik. Sedikitnya perusahaan yang memiliki kebijakan anti korupsi ini disebabkan karena perusahaan yang ada di Indonesia masih belum diwajibkan memiliki kebijakan anti korupsi, kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan hanya bersifat sukarela. Belum adanya kewajiban yang diberikan pemerintah mengenai kebijakan anti korupsi perusahaan ini membuat perusahaan belum *concern* tentang kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaannya.

Dalam analisis yang sudah dilakukan, dilihat bahwa nilai indeks kebijakan anti korupsi yang ada pada penelitian ini skor tertinggiya didapat dengan item perhitungan *Whistleblower*.

4.3 Pengujian hipotesis

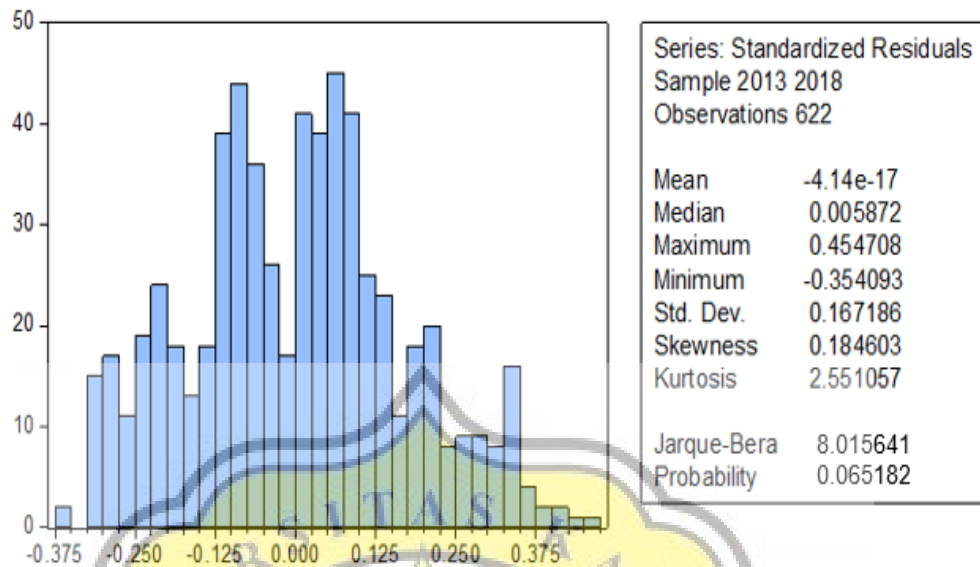
4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolienaritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas dan sudah memenuhi adanya kriteria.

4.3.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji *Jarque Bera* yang diolah dengan menggunakan program *E-views*.

Tabel 4.3 Uji Normalitas



Sumber: Lampiran 5

Pada Gambar dan tabel 4.1 bisa dilihat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* yang ada pada hasil penelitian ini adalah sebesar 0.052. Hasil yang diperoleh dari pengolahan uji normalitas 0.065 > 0.05 dapat disimpulkan bahwa standarized residual penelitian ini **berdistribusi normal**.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan guna mengetahui apakah ada atau tidak korelasi yang ada antar variabel penelitian. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*). Peneliti akan melihat nilai hasil dari VIF penelitian. Jika nilai VIF yang dihasilkan <10, maka hasil dari penelitian bisa dipastikan tidak mengalami multikolinearitas.

Berikut adalah hasil dari VIF dalam penelitian:

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

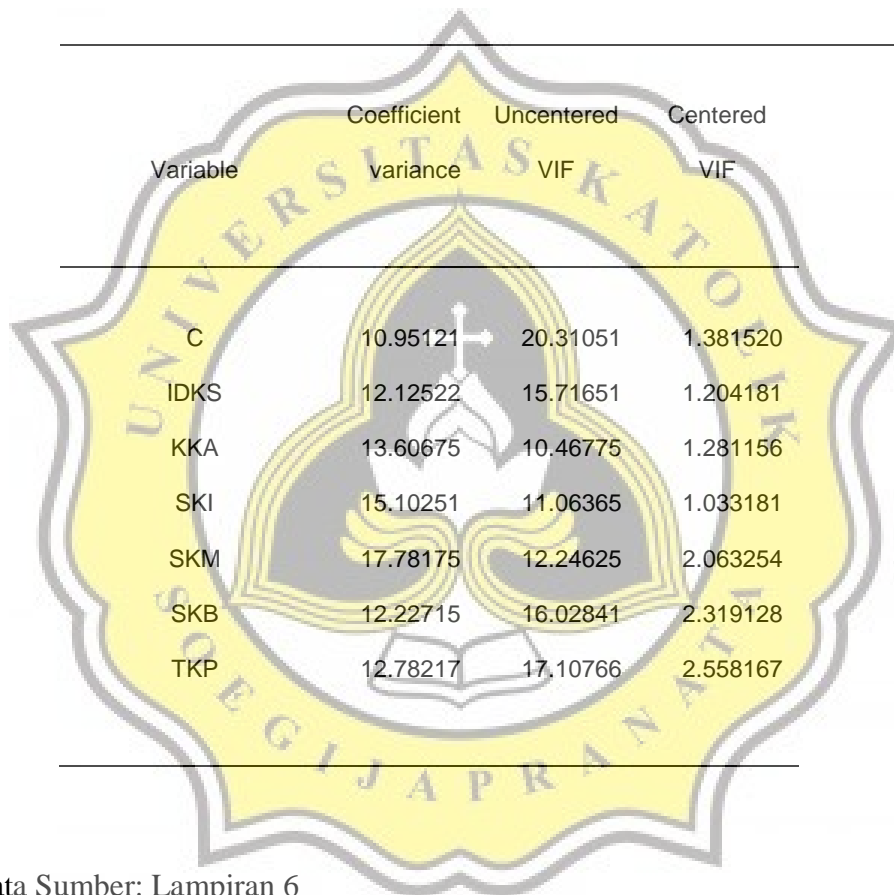
Date: 08/09/20 Time: 17:07

Sample: 2013 2018

Periods included: 6

Cross-sections included: 104

Total panel (unbalanced) observations: 622



Variable	Coefficient variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	10.95121	20.31051	1.381520
IDKS	12.12522	15.71651	1.204181
KKA	13.60675	10.46775	1.281156
SKI	15.10251	11.06365	1.033181
SKM	17.78175	12.24625	2.063254
SKB	12.22715	16.02841	2.319128
TKP	12.78217	17.10766	2.558167

Data Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan dalam tabel 4.2 VIF variabel Dewan Komisaris Independen (IDKS) adalah sebesar 1.20 , VIF dari variabel Kompetensi Komite Audit (KKA) adalah sebesar 1.28, VIF dari variabel Struktur Kepemilikan Institusional (SKI) adalah sebesar 1.03, VIF dari variabel Struktur Kepemilikan Manajerial (SKM) adalah sebesar 2.06, VIF dari variabel Struktur

Kepemilikan *Blockholder* (SKB) adalah sebesar 2.31 sedangkan VIF untuk variabel Tata Kelola Perusahaan (TKP) adalah sebesar 2.55 yang berarti seluruh variabel memiliki nilai di bawah 10. Jika dilihat berdasarkan nilai yang ada, bisa dilihat bahwa nilai VIF tiap variabel berada di bawah nilai 10, yang artinya **tidak terjadi masalah multikolinearitas** pada penelitian ini.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan *uji Glejser* untuk menguji heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dan absolut residual yang dihasilkan variabel pada penelitian > 0.05 , maka penelitian ini tidak terjadi masalah dalam heteroskedastisitas.

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/09/20 Time: 17:08
 Sample: 2013 2018
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 104
 Total panel (unbalanced) observations: 622

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.156083	0.020214	7.721562	0.0000
IDKS	0.023005	0.032917	0.698878	0.4251
KKA	0.007888	0.014202	0.555423	0.1357

SKI	-0.017575	0.015049	-1.167831	0.7021
SKM	-0.035618	0.030208	-1.179101	0.1285
SKB	-0.025892	0.022620	-1.144659	0.3128
TKP	-0.003101	0.021942	-0.141332	0.9697

Sumber: Lampiran 7

Jika dilihat melalui tabel 4.3 Prob (sig) yang dihasilkan oleh variabel Dewan Komisaris Independen (IDKS) adalah sebesar 0.425, variabel Kompetensi Komite Audit (KKA) adalah sebesar 0.135, variabel Struktur Kepemilikan Institusional (SKI) adalah sebesar 0.702, variabel Struktur Kepemilikan Manajerial (SKM) adalah sebesar 0.128, variabel Struktur Kepemilikan *Blockholder* adalah sebesar 0.312 dan variabel Tata Kelola Perusahaan (TKP) adalah sebesar 0.969. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa nilai probabilitas (sig) yang dihasilkan oleh variabel penelitian ini > 0.05 yang artinya penelitian ini **tidak memiliki masalah heteroskedastisitas**.

4.3.1.4 Uji Autokorelasi

Data yang di peroleh bisa digunakan setelah dilakukan pengobatan *cut-off* untuk mengobati data yang tadinya terjadi autokorelasi. (Andiani, 2012). Pada penelitian ini pengujian autokorelasi dilakukan dengan melakukan uji nilai *Durbin Watson (DW)*.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum *Cut-off*

Dependent Variable: KAK

Method: Panel Least Squares

Date: 08/09/20 Time: 17:10

Sample: 2013 2018

Periods included: 6

Cross-sections included: 104

Total panel (unbalanced) observations: 622

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.284631	0.035105	8.813210	0.0000
IDKS	0.033924	0.057166	0.716320	0.4741
KKA	-0.042356	0.024665	-1.878993	0.0607
SKI	0.003986	0.026136	1.016297	0.3099
SKM	0.063895	0.052461	1.128945	0.2389
SKB	-0.090080	0.030690	-2.935171	0.0035
TKP	0.296243	0.041892	7.071658	0.0000
				0.22778
R-squared	0.110967	Mean dependent var		6
				0.16647
Adjusted R-squared	0.102294	S.D. dependent var		8
				-
				0.84463
S.E. of regression	0.157733	Akaike info criterion		2
				-
				0.79474
Sum squared resid	15.30107	Schwarz criterion		4

			0.82524
Log likelihood	269.6806	Hannan-Quinn criter.	3
			0.97985
F-statistic	12.79387	Durbin-Watson stat	1
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber data : Lampiran

Sebelum adanya pengobatan yang dilakukan, nilai durbin-watson stat yang dihasilkan adalah sebesar 0.979851 yang berarti nilai *Durbin Watson* tidak berada diantara DU (1.5) dan 4-DU (2.5).

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Sesudah *Cut-off*

Dependent Variable: KAK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/09/20 Time: 17:13
 Sample: 2013 2018
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 104
 Total panel (unbalanced) observations: 622

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207951	0.035105	5.923678	0.0000
IDKS	0.122549	0.057166	2.145412	0.0331
KKA	0.046067	0.024665	1.867671	0.0615
SKI	-0.188025	0.026136	-7.194071	0.0000
SKM	-0.178175	0.052461	-3.396342	0.0007

SKB	0.122276	0.039284	3.112795	0.0017
TKP	0.277219	0.038107	7.274892	0.0000

R-squared	0.179231	Mean dependent var	0.285466
Adjusted R-squared	0.161132	S.D. dependent var	0.183426
			-
S.E. of regression	0.167999	Akaike info criterion	0.718522
			-
Sum squared resid	17.35764	Schwarz criterion	0.668634
			-
Log likelihood	230.4604	Hannan-Quinn criter.	0.699133
F-statistic	20.88057	Durbin-Watson stat	1.562851
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber data : Lampiran 8.

Hasil dari uji *Durbin Watson* penelitian ini digambarkan pada tabel 4.5. Pada penelitian ini, nilai *Durbin Watson* berada diantara DU (1.5) dan 4-DU (2.5). Melihat hasil nilai yang ada dalam penelitian, bisa dikatakan **tidak terjadi auto korelasi** pada penelitian ini.

Nilai probabilitas (signifikansi F) $0.000 < 0.05$. Jika dilihat nilai probabilitas dapat dikatakan bahwa model fit, yang berarti variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai R-Squared dalam penelitian ini adalah sebesar 0.179 yang memiliki arti bahwa tingkat variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,179 selain itu variabel dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian.

4.3.1.5 Uji Hipotesis

Jika pengujian asumsi klasik pada penelitian ini telah terpenuhi, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat hasil dari t-statistic yang ada pada tabel 4.7.

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Dependent Variable: KAK
Method: Panel Least Squares
Date: 08/09/20 Time: 17:13
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 104
Total panel (unbalanced) observations: 622

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207951	0.035105	5.923678	0.0000
IDKS	0.122549	0.057166	2.145412	0.0331
KKA	0.046067	0.024665	1.867671	0.0615
SKI	-0.188025	0.026136	-7.194071	0.0000
SKM	-0.178175	0.052461	-3.396342	0.0007
SKB	0.122276	0.039284	3.112795	0.0017
TKP	0.277219	0.038107	7.274892	0.0000

Berdasarkan tabel 4.5 apabila t-statistik dari variabel lebih besar dari t-tabel yang ada, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berbunyi semakin besar proporsi dewan komisaris yang independen, maka kebijakan anti korupsi dalam perusahaan semakin baik. Berdasarkan tabel 4.5 bisa dilihat bahwa untuk variabel dewan komisaris independen (IDKS) memiliki nilai t-statistik sebesar 2.14. Nilai t-statistik yang dihasilkan $>$ t-tabel sebesar 1.645, maka bisa dikatakan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Penerimaan hipotesis pertama dalam penelitian ini memiliki arti bahwa dewan komisaris independen perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi pada perusahaan. Penerimaan hipotesis ini didukung oleh penelitian terdahulu milik Dyah Ayu (dyah ayu & hartomo, 2019) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen perusahaan berpengaruh positif terhadap perusahaan dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi perusahaannya. Dewan komisaris Independen berpengaruh positif karena memiliki peran penting dalam pengawasan keputusan manajemen. Dengan adanya dewan komisaris independen yang ada dari luar perusahaan bisa mendorong manajemen dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi pada perusahaannya guna tetap menjaga *feedback* yang baik dari masyarakat kepada perusahaannya.

Penelitian lainnya yang mendukung adalah penelitian dari (Said et al., 2009) dan (Eng & Mak, 2003) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi keputusan manajemen perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris yang independen, maka pengawasan yang ada dalam perusahaan semakin lebih baik, jika pengawasan manajemen baik,

maka tingkat perbedaan kepentingan yang ada antara manajemen dengan pemegang kekuasaan berkurang.

Dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan dan tidak bisa dipengaruhi kinerjanya, manajemen akan lebih bersikap transparan terhadap pekerjaannya di dalam perusahaan dan menghindari kecurangan karena dewan komisaris independen akan memeriksa kinerja tanpa pengaruh perbedaan kepentingan. Pengaruhnya terhadap perusahaan adalah ketika perusahaan memiliki dewan komisaris independen yang tinggi bisa perusahaan tersebut memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah semakin besar proporsi komite audit yang berkompeten di perusahaan, maka kebijakan anti korupsi pada perusahaan semakin baik. Berdasarkan dari perhitungan tabel 4.5, bisa dilihat bahwa nilai untuk t hitung variabel kompetensi komite audit atau di tuliskan KKA memiliki nilai t-statistik sebesar $1.86 > 1.645$ dari t-tabelnya, maka bisa dikatakan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel kompetensi komite audit yang ada dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.

Pernyataan dalam penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Chemmanur & Paeglis, 2005) yang menyatakan bahwa seorang yang memiliki pengalaman cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Pengalaman serta kompeten yang ada bisa mendorong manajemen dalam meningkatkan kualitas

dari perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (dyah ayu & hartomo, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit yang ada di perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan dari kebijakan anti korupsi perusahaan. Perusahaan dengan komite audit yang berkompeten akan lebih tidak bisa dibohongi dan bisa melihat adanya kecurangan yang ada dalam perilaku manajerial. Jika komite audit perusahaan memiliki kompetensi pada bidangnya, maka korupsi dan kecurangan perusahaan akan berkurang yang berarti kebijakan dari anti korupsi perusahaan baik. Alasan ditolaknya hipotesis ini yaitu karena memiliki nilai mean yang rendah dilihat dari statistik deskriptifnya.

Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah semakin besar kepemilikan institusional, maka kebijakan anti korupsi dalam perusahaan semakin baik. Dari tabel yang ada diatas (tabel 4.5) diperlihatkan bahwa nilai t statistik dari variabel struktur kepemilikan institusional (SKI) adalah sebesar $-7.19 < 1.645$. Karena t-statistik hitung yang ada dari variabel SKI lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yang sebesar 1.645 dan memiliki nilai yang berbeda arah (minus) maka hipotesis ketiga ditolak.

Dilihat berdasarkan nilai rata-rata struktur kepemilikan yang ada pada sektor perdagangan, jasa dan investasi bisa dilihat bahwa pada sektor ini memiliki kepemilikan saham institusional yang tinggi yang artinya perusahaan pada sektor perdagangan, jasa dan investasi dimiliki oleh kepemilikan institusional sebesar dengan nilai rata-rata sebesar 45,51%. Walaupun nilai struktur kepemilikan institusional terbilang cukup tinggi jika di bandingkan dengan kepemilikan lainnya,

tetapi kepemilikan institusional yang ada dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi yang ada pada perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya pengelompokan kepemilikan institusional pada sampel laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan mengelompokkan kepemilikan institusional kedalam beberapa pengelompokan seperti dimiliki oleh perusahaan asuransi, bank swasta maupun Negara, perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, koperasi simpan pinjam, maupun insituti perusahaan yang memiliki tujuan utama pada profit dan tidak begitu memerdulikan aktifitas dari perusahaan. Institusional yang ada perusahaan sampel rata-rata bergerak dalam bidang perputaran dana nasabahnya sehingga membuat institusional yang memiliki kepemilikan cenderung fokus pada profit atau keuntungan yang ada pada perusahaan. Walaupun kebijakan anti korupsinya rendah, selagi masih menghasilkan keuntungan yang bisa diambil dan menjanjikan, institusional akan tetap menanamkan kepemilikannya.

Hipotesis 4

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka kebijakan anti korupsi dalam perusahaan semakin baik. Berdasarkan dari tabel 4.5 nilai yang muncul pada t-statistik variabel struktur kepemilikan manajerial (SKM) sebesar -3.39 yang lebih kecil dari pada t-tabel yang sebesar 1.645 dan memiliki arah yang berbeda (minus) maka, hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan.

Penolakan variabel ini didukung dengan pernyataan pada penelitian skripsi milik Hermanto Santanando (2019) yang mengatakan bahwa struktur kepemilikan yang berada dibawah nilai 10% yang artinya kepemilikan dapat dianggap sebagai pemilik perusahaan, namun presentase saham yang dimiliki oleh pemilik saham tidak cukup mampu mempengaruhi keputusan dari perusahaan. Alasan hipotesis struktur kepemilikan manajerial ditolak karena jika dilihat dari nilai rata-rata untuk variabel Struktur Kepemilikan Manajerial adalah sebesar 5.1% nilai yang dihasilkan ini relatif kecil sehingga tidak cukup mempengaruhi keputusan dari perusahaan. Berdasarkan penjelasan dan interpretasi yang ada, dibuktikan bahwa nilai kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi yang baik.

Hipotesis 5

Hipotesis kelima dari penelitian ini adalah semakin besar proporsi kepemilikan *blockholder*, maka nilai kebijakan anti korupsi dalam perusahaan semakin baik. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai t-statistik dari variabel struktur kepemilikan *blockholder* adalah sebesar $3.11 > 1.645$ dan bersifat positif. Maka, kesimpulannya hipotesis kelima dari penelitian ini diterima. Hipotesis kelima pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap kebijakan anti korupsi pada perusahaan.

Penerimaan dari hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Seifert et al (2005) yang mengatakan bahwa kepemilikan *blockholder* secara potensial bisa mengurangi adanya konflik keagenan yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham yang ada di perusahaan, hal ini dikarenakan kepemilikan *blockholder* bertindak sebagai pemegang saham mayoritas memegang kendali

terhadap kinerja manajer dalam perusahaan, yang membuat tindakan manajer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang saham.

Hal ini juga diperkuat berdasarkan penjelasan statistic deskriptif yang mengatakan bahwa kepemilikan saham yang ada dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi didominasi oleh kepemilikan saham yang bernilai 5% atau lebih. Nilai rata-rata yang ada pada variabel kepemilikan saham blockholder sebesar 70% dibandingkan dengan kepemilikan saham yang memiliki nilai dibawah 5% yang hanya mempengaruhi sebesar 30%. Perbedaan yang cukup signifikan antara kepemilikan *blockholder* dengan kepemilikan saham lainnya membuat *blockholder* memiliki hak suara untuk memberikan pendapat perihal kebijakan yang ada pada perusahaan.

Hipotesis 6

Hipotesis keenam dari penelitian ini adalah semakin besar persentase tata kelola perusahaan, maka kebijakan anti korupsi perusahaan semakin baik pula. Dari tabel 4.5 diketahui nilai t-statistik dari variabel tata kelola perusahaan atau TKP adalah sebesar $7.27 > 1.645$ t-tabel dan bersifat positif. Maka, dari hasil yang ada pada perhitungan tabel, bisa disimpulkan bahwa hipotesis keenam dalam penelitian ini diterima. Hipotesis diterima memiliki arti bahwa variabel tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi.

Penerimaan hipotesis dalam penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Krishnamurthy et al (2012) yang menyimpulkan bahwa variabel tata kelola perusahaan bisa mempengaruhi kebijakan anti korupsi yang baik didalam perusahaan. Penetapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan dapat

meminimalkan terjadinya kecurangan atau perbedaan kepentingan yang ada antara *agent* dan *principal*, seperti yang diungkapkan oleh Besari(2009) dan juga Law (2011) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan bisa meminimalkan adanya kecurangan dan perbedaan kepentingan yang ada di perusahaan.

4.3.1.6 Pembahasan

Korupsi dan kecurangan pada perusahaan masih menjadi hal yang sering kita temui dalam beberapa organisasi baik dalam perusahaan maupun pemerintahan di Indonesia. Kecurangan yang ada dalam perusahaan salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang ada di dalam perusahaan maupun organisasi. Penelitian yang dilakukan ini sebagai bentuk dukungan akuntan terhadap pernyataan milik IFA (2017) yang mengatakan bahwa seorang akuntan harus berperan dalam memberantas dan memerangi korupsi karena memiliki efek yang paling berbahaya dan mendesak yang dihadapi oleh beberapa Negara. Perbedaan kepentingan yang menjadi salah satu alasan adanya korupsi dan kecurangan di organisasi maupun perusahaan ini bisa diminimalkan dengan adanya beberapa variabel yang menjadi variabel dalam penelitian ini seperti dewan komisaris independen, kompetensi komite audit, struktur kepemilikan saham yang dibagi menjadi kepemilikan manajerial, institusional, dan *blockholder*, dan juga tata kelola perusahaan yang baik.

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar dan berada dibawah sektor perdagangan, jasa dan investasi. Alasan mengapa peneliti mengambil sampel dengan sektor tersebut adalah dikarenakan pada masa pemerintahan presiden Joko widodo sektor perdagangan, jasa dan investasi menjadi

penyumbang pendapatan Negara terbesar nomor dua dan menjadi fokus utama dari pendapatan Negara di bidang ekspor barang perdagangan. Sebagai penyumbang pendapatan Negara yang juga memiliki arti menjadi jantung utama dari perekonomian perdagangan Indonesia, perusahaan yang berdiri dan terdaftar dalam sektor ini harus bersih dari adanya kecurangan maupun korupsi, maka dari itu kebijakan anti korupsi yang ada dalam perusahaan di sektor ini harus baik.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis, bisa dilihat dan disimpulkan bahwa lewat penelitian yang dilakukan ini bisa melihat bahwa beberapa variabel yang ada di dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan. Hal ini mendukung tujuan dari peneliti untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat guna menambah literatur teori bagi penelitian yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan terhadap kebijakan anti korupsi. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mendukung tujuan peneliti untuk memberikan informasi terhadap perusahaan untuk memperhatikan poin penting yang ada di perusahaan guna meminimalkan adanya kecurangan maupun korupsi yang terjadi di perusahaannya.

Berdasarkan penelitian ini juga peneliti berharap bisa menjadi tolak ukur untuk kebijakan anti korupsi yang ada di dalam perusahaan yang berada di sektor perdagangan, jasa dan investasi. Menilai masalah korupsi dan kecurangan perusahaan juga menjadi hal yang sangat penting yang harus segera ditangani dengan baik.